



## INTISARI

Semarang salah satu kota dengan kasus kekerasan anak tertinggi di Jawa Tengah, permasalahan ini menjadi perhatian serius yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Dalam penanganan kasus kekerasan anak tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016. Peraturan ini menggunakan pendekatan multi sektor sehingga pentingnya sinergitas antara aktor untuk mencapai tujuan dalam peraturan tersebut. Penelitian ini menganalisis bagaimana sinergitas yang terbangun antar aktor melalui koordinasi dan komunikasi yang terjalin, serta faktor apa saja yang mempengaruhi sinergitas antara *stakeholders*. Asumsinya adalah jika sinergitas antar aktor dalam penanganan kasus kekerasan dilakukan secara maksimal maka akan memiliki dampak terhadap turunnya kasus kekerasan anak di kota Semarang.

Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana sinergitas *stakeholder* dalam penanganan kasus kekerasan anak serta menganalisis faktor yang mempengaruhi terjalinya sinergitas antar *stakeholder*. Metode pada penelitian ini metode kualitatif, dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dan data sekunder melalui buku, jurnal, tinjauan pustaka, dan dokumentasi terkait.

Penelitian ini mendeskripsikan, belum optimalnya koordinasi dan komunikasi yang dijalin antara aktor yang terlibat, hal tersebut dilihat dari beberapa aspek koordinasi yang masih menjadi kendala yaitu kesatuan tindakan, pembagian kerja, hubungan kerja antara instansi pemerintah maupun non pemerintah. Selain itu kepemimpinan, kepercayaan, dan legitimasi menjadi faktor yang mempengaruhi terjalinya sinergitas antar *stakeholder*. Dengan permasalahan yang ada diharapkan pemerintah mampu melakukan evaluasi dan menyadari bahwa masih terdapat kendala yang krusial terkait pelaksanaan penanganan kasus kekerasan anak di kota Semarang.

Kata kunci: Sinergitas *Stakeholder*, Komunikasi, Koordinasi, Kekerasan anak



## ABSTRAK

Semarang is one of the cities with the highest child violence cases in Central Java, this problem become serious attention from the governments to be handled. In handling cases of child violence, the government issued regional regulation number 5 of the year 2016. This regulation uses a multi-sector approach to the importance of synergy between actors to reach the goal of the regulation. This research analyzes how synergy is built between actors through established coordination and communication, as well as what factors influence the synergy between stakeholders. The assumption is that if the synergy between actors in handling cases of violence is carried out optimally, it will have an impact on reducing cases of child violence in Semarang.

This study aims to find out and analyze stakeholder synergy in handling cases of child violence and analyze factors that influence synergy between stakeholders. The method used in the study is qualitative methods. Data sources were obtained from primary data, which is direct interviews, and secondary data through books, journals, literature studies, and associated documentation.

This research result describes that the coordination and communication between the actors involved are not optimally established yet. This can be seen from several aspects of coordination which are still going through some obstacles, which are the unity of action, division of work, and working relationships between government and non-government institutes. Apart from that, leadership, trust, and legitimacy are factors that influence the establishment of the synergy between stakeholders. With the existing problems, it is hoped that the government will be able to carry out an evaluation and realize that there are still crucial obstacles related to the implementation of handling child violence cases in Semarang.

**Keywords:** Stakeholders synergy, Communication, Coordination, Child Violence